

TATA KELOLA MASALAH PUBLIK: SUATU ANCANGAN BAGI PRAKTIK ANALIS KEBIJAKAN DI INDONESIA



Pidato

Disampaikan pada Pengukuhan Jabatan Guru Besar
dalam Bidang Ilmu Kebijakan Publik dan Governansi
pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga
di Surabaya pada Hari Kamis, Tanggal 21 September 2023

Oleh

ANTUN MARDIYANTA

Bismillahirrahmanirrahim

*Rabbis rahlii shadrii, wa yassirlil amrii, wahlul 'uqdatam mil
lisaani yafqahu qaulii*

Yang saya hormati,

Ketua dan Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga

Rektor Universitas Airlangga

Ketua, Sekretaris dan Anggota Senat Akademik Universitas
Airlangga

Sekretaris Universitas Airlangga

Wakil Rektor Universitas Airlangga

Dekan dan Wakil Dekan FISIP Universitas Airlangga

Para Dekan dan Wakil Dekan di Universitas Airlangga

Direktur dan Wakil Direktur di Universitas Airlangga

Kepala Badan, Ketua Lembaga, dan Sekretaris Badan/Lembaga
di Universitas Airlangga

Para Guru Besar Universitas Airlangga dan Guru besar Tamu

Para Sejawat, dan segenap Sivitas Akademika Universitas
Airlangga

Serta para keluarga, tamu undangan dan hadirin sekalian yang
saya hormati

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakaatuh

*Alhamdulillah wash sholatu wassalam ala rasulillah wa alaa
aalihi wa sohbihi ajma'in*

Salam sejahtera untuk kita semua

Saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan ibu
sekalian pada acara Sidang Universitas Airlangga. Perkenankan
saya menyampaikan pidato pengukuhan sebagai Guru Besar
dengan judul: **Tata Kelola Masalah Publik: Suatu Ancangan
bagi Praktik Analisis Kebijakan di Indonesia.**

Hadirin yang saya muliakan,

Pada saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) RPJMN 2015–2019, 18 Desember 2014, Presiden Joko Widodo menyatakan, “Jika ada sebuah kebijakan publik yang benar dan tepat, akan majulah negara, majulah provinsi, majulah kota dan kabupaten” (Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 2014). Kalimat ini Presiden ucapkan dua bulan setelah mengambil sumpah jabatannya sebagai Presiden, secara simbolis menyatakan bahwa terdapat visi dan komitmen untuk memajukan bangsa melalui *konten kebijakan* yang tepat, yakni menjawab kebutuhan tiap-tiap masyarakat yang terdampak olehnya. Namun demikian, hari ini, satu tahun sebelum masa jabatan Presiden berakhir, terdapat banyak polemik terkait kebijakan public, ditandai dengan meningkatnya aktivisme yang menentang kebijakan yang dibuat, seperti revisi atas UU KPK pada 2019 dan UU Cipta Kerja yang kontroversial pada 2020. Realitas ini sesungguhnya memperlihatkan bahwa tidak cukup bila hanya berbicara mengenai konten kebijakan. Perlu ada perhatian yang mendalam pada proses kebijakan, yang dalam bentuk paling sederhananya terdiri dari tiga tahapan, mulai dari formulasi kebijakan, implementasi kebijakan, hingga evaluasi kebijakan.

Setelah kurang lebih 36 tahun menjadi pengajar ilmu kebijakan (*policy sciences*) di Universitas Airlangga, pertanyaan utama yang selalu menggelisahkan saya adalah apakah ilmu kebijakan dengan berbagai asumsi, metodologi, dan perkembangan pemikirannya sudah mampu menjawab tantangan aktual proses pembuatan dan pengaplikasian kebijakan publik. Untuk lebih spesifik, kegundahan saya dapat pula diartikulasikan dalam pertanyaan berikut: sejauh mana ilmu kebijakan dapat sungguh-sungguh memperlengkapi para analis kebijakan kita, khususnya

yang bekerja di dalam tubuh pemerintahan, agar mereka dapat menjadi instrumen yang andal bagi konten dan proses kebijakan yang baik? Dengan kata lain, kegelisahan saya berusaha memutus kesenjangan dikotomis antara teori dan praksis dalam ilmu kebijakan. Untuk itu, izinkanlah saya menyampaikan secercah pemikiran saya mengenai hal tersebut.

Alur pikir pidato ini dapat dikatakan cukup sederhana. Pertama-tama, saya akan memulai pemaparan saya dengan mengangkat problematika birokrasi dan tantangan kebijakan kontemporer di Indonesia yang pada akhirnya menuntut para ilmuwan kebijakan, termasuk saya, untuk memikirkan ulang relevansi ilmu kebijakan yang diajarkan di ruang-ruang kelas perguruan tinggi. Selanjutnya, saya akan memaparkan konstruksi atas berbagai tradisi intelektual (*school of thought*) ilmu kebijakan serta implikasi praktisnya dalam tata kelola masalah publik (*governance of public problems*). Terakhir, saya juga akan memberikan beberapa rekomendasi berbasis konstruksi teoretis mengenai bagaimana kita dapat menghasilkan para analis kebijakan yang dapat menjadi instrumen penciptaan konten kebijakan yang unggul dan proses kebijakan yang sehat, baik dalam kemampuan analisis maupun advokasinya, di tengah era masifnya penggunaan berbagai teknologi informasi dan komunikasi saat ini.

Hadirin yang saya hormati,

Problematika Birokrasi dan Tantangan Kebijakan Kontemporer

Dalam pidato awal periode kedua pada 20 Oktober 2019, Presiden Joko Widodo mengungkapkan keinginannya untuk menyederhanakan birokrasi pada tingkat Kementerian dan Lembaga dengan mengurangi eselon menjadi dua tingkat saja,

yaitu eselon I dan II, serta berfokus pada jabatan fungsional saja yang menghargai keahlian dan kompetensi (CNBC Indonesia 2019). Sementara itu, tugas administratif yang biasa dikerjakan oleh eselon III dan IV akan digantikan oleh teknologi kecerdasan buatan '*artificial intelligence*' (Dzulfaroh 2019). Konversi jabatan struktural-administratif menjadi jabatan fungsional, ungkap Mensesneg Pratikno, berguna bagi konsolidasi sumber daya negara, baik anggaran maupun sumber daya manusia di tengah era disrupsi yang serba cepat dan tidak menentu (Kementerian Sekretariat Negara 2021). Dengan kata lain, restrukturisasi ini perlu dilakukan agar pengambilan kebijakan menjadi lebih efisien (*agile*) demi menjawab tantangan zaman.

Wacana yang dilontarkan Presiden kemudian dilaksanakan melalui Permen Pan & RB Nomor 28 Tahun 2019 yang telah diperbaharui dengan Permen PAN & RB Nomor 17 Tahun 2021 tentang tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional yang juga nantinya direvisi sebagian dengan Permen PAN & RB No. 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Lembaga Administrasi Negara 2022). Permasalahan menjadi muncul ketika restrukturisasi yang masif ini, di mana diperkirakan sekitar 430 ribu pejabat struktural-administratif terdampak atasnya (Safurta 2019), tidak diikuti dengan adanya peningkatan kualitas kompetensi mereka yang akan mengemban tugas pada jabatan fungsional yang relevan, salah satunya Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan (JFAK) yang baru dibentuk pada tahun 2013 berdasarkan Permen PAN & RB No. 45 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan dan Angka Kreditnya. Lebih lagi, menurut Tjahjo Kumolo, mantan Menteri PAN & RB, JFAK merupakan jabatan fungsional yang strategis dan menarik minat para ASN setelah kebijakan restrukturisasi dan penyederhanaan birokrasi tersebut muncul (Kristina *et al.* 2021).

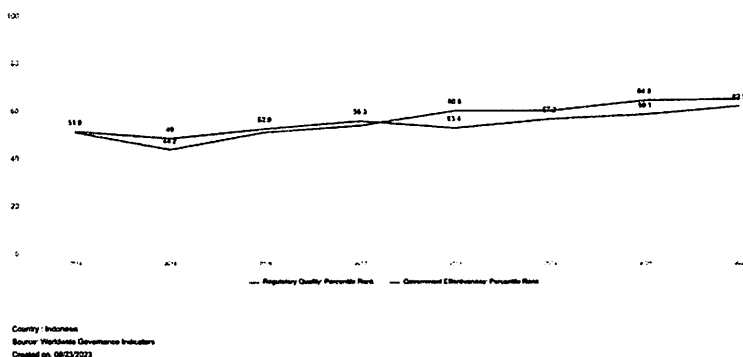
Lalu, di mana letak permasalahannya? Analisis kebijakan merupakan fungsi yang bertugas memberikan saran kepada pemerintah selaku pihak yang memiliki otoritas untuk menyusun kebijakan (Purwanto *et al.* 2015). Pemberian saran kepada pemerintah ini dilakukan setidaknya dalam tiga tahap, yaitu tahap analisis masalah kebijakan, tahap dokumentasi kebijakan, dan tahap komunikasi kebijakan (tahap utilisasi kebijakan tidak termasuk di dalamnya sebab bukan merupakan ranah analisis kebijakan melainkan pembuat kebijakan) (Dunn 2018). Sejauh ini, berdasarkan data Pusat Pembinaan Analisis Kebijakan LAN, jumlah JFAK, baik di Kementerian/Lembaga maupun Pemerintah Daerah mengalami peningkatan jumlah sebesar 800 persen atau sembilan kali lipat semenjak kebijakan restrukturisasi birokrasi hingga hari ini (Lihat Tabel 1). Dengan peningkatan besaran kuantitas analisis kebijakan yang sedemikian, perlu dipertanyakan tiga hal: pertama, sejauh mana metodologi analisis yang digunakan dapat secara tepat mengelola masalah publik. Kedua, sejauh mana kualitas hasil analisis yang dikerjakan dapat menjawab persoalan publik. Ketiga, sejauh mana daya atau kuasa yang dapat ditimbulkan oleh analisis kebijakan melalui hasil analisisnya. Akhirnya, ketiga hal tersebut dapat disimpulkan dalam satu pertanyaan yang praktis,

Tabel 1. Perbandingan Jumlah JFAK pada 2020 dan 2023

Institusi	Jumlah (2020)	Jumlah (2023)
Kementerian	466	862
Lembaga	126	311
Provinsi	48	967
Kota	13	970
Kabupaten	29	2.368
Total	682	5.478

Sumber: Pusat Pembinaan Analisis Kebijakan LAN RI

Grafik 1. Efektivitas Tata Kelola dan Kualitas Regulasi Indonesia (2014–2021)



Sumber: *Worldwide Governance Indicator*

namun mendasar: sejauh mana pemberdayaan terhadap para analis kebijakan tersebut telah dilakukan kepada para analis kebijakan sehingga dapat menciptakan analis kebijakan yang dapat *‘speaking truth to power’*? (Wildavsky 2017; Ginsberg dan Paschal 2022).

Bila merujuk pada pengukuran yang secara objektif dilakukan oleh *Worldwide Governance Indicator*, efektivitas tata kelola (*governance effectiveness*) dan kualitas regulasi (*regulatory quality*) Indonesia mendapat poin 65.4 dari 100 dan 62.5 dari 100 pada tahun 2021. Efektivitas tata kelola merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur persepsi terhadap kualitas pelayanan publik, kualitas pelayanan publik dan tingkat independensinya dari tekanan politik, kualitas perumusan dan implementasi kebijakan, serta kredibilitas komitmen pemerintah terhadap kebijakan tersebut. Sementara itu, indeks kualitas regulasi mencakup persepsi mengenai kemampuan pemerintah dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan peraturan yang baik yang memungkinkan dan mendorong pengembangan sektor swasta. Dengan kata lain, kedua indeks ini terkait erat dengan konten dan proses kebijakan publik suatu negara. Meski kedua angka

ini mengalami peningkatan secara perlahan dari tahun-tahun sebelumnya (khususnya sejak 2014 di mana JFAK mulai bekerja di dalam tubuh birokrasi), masih terdapat ruang yang besar bagi perbaikan birokrasi Indonesia untuk terus meningkatkan dengan laju yang lebih cepat kualitas konten maupun proses kebijakan publiknya. Tentunya, peningkatan kedua indikator tersebut tidak lepas dari peran serta para analis kebijakan yang berada di dalam tubuh birokrasi untuk menjadi penyedia informasi dan pengetahuan bagi para pengambil kebijakan.

Perlu dipertimbangkan pula faktor lain di luar birokrasi yang turut memengaruhi kualitas konten dan proses kebijakan publik. Media sosial dengan pengaruhnya yang kian masif muncul sebagai aktor baru dalam proses kebijakan publik, tak terkecuali di Indonesia. Media sosial telah menjadi ruang kontestasi wacana yang dapat memengaruhi opini publik atas kebijakan publik, menyuarakan tuntutan ketidakpuasan mereka yang merasa dipinggirkan dari proses kebijakan, bahkan memobilisasi massa untuk turun ke jalan (Gerbaudo 2012; Rambukkana 2015). Demonstrasi besar atas wacana revisi UU KPK (Suwana 2020) dan RUU Cipta Kerja menjadi salah satu contoh nyata bagaimana media sosial turut berperan dalam mendisrupsi proses kebijakan publik. Kita ada di dalam era pascakebenaran, di mana kebergantungan pada kebenaran yang bersumber pada rasionalitas dan penelusuran empiris (*evidence-based*) menjadi goyah, digantikan oleh emosi massa dengan definisi kebenaran versinya sendiri (Fischer 2021). Dengan demikian, proses kebijakan hari-hari ini menjadi lebih kompleks dengan masalah kebijakan yang pelik pula, atau yang dalam literatur ilmu kebijakan dikenal istilah *wicked problems*. (Head 2022).

Melihat realitas ini, baik problematika yang terdapat di dalam birokrasi maupun masalah kebijakan yang semakin kompleks, analis kebijakan Indonesia dapat tampil sebagai pecundang yang

gagap dalam merespons tantangan kontemporer, atau justru menjadikan realitas ini sebagai peluang untuk dengan gigih memperbaiki kualitas konten dan proses kebijakannya, khususnya melalui pemberdayaan para analis kebijakan kita. Bagaimana kita harus merespons hal ini?

Hadirin yang saya banggakan,

Keragaman Epistemologis dalam Analisis Kebijakan

Pada April 2023 lalu, buku saya yang berjudul *Memahami Kebijakan Publik: Perspektif Teori, Perkembangan dan Diskursus* diterbitkan oleh Penerbit Graha Ilmu. Di dalam buku tersebut, saya mencoba untuk memaparkan konstruksi teoretis saya atas ilmu kebijakan yang dipandu oleh basis epistemologisnya. Basis epistemologis inilah yang pada akhirnya berbuah pada metodologi serta logika praktik analisis suatu kebijakan publik. Buku tersebut saya tulis untuk mengisi kekosongan literatur kebijakan publik di Indonesia yang seringkali tidak memaparkan pendasaran epistemologi suatu metode analisis dan hanya berfokus pada langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam mengaplikasikan suatu metode analisis kebijakan tersebut. Hal ini berdampak pada pemahaman parsial analis kebijakan atas metode-metode yang digunakannya, serta kecenderungan untuk menggunakan satu atau dua metode analisis kebijakan yang mapan tanpa adanya eksplorasi dan penghargaan terhadap metode lainnya. Dalam pidato ini, izinkan saya untuk kembali menegaskan pentingnya keragaman epistemologi dan metodologi dalam praktik analisis kebijakan, khususnya bagaimana hal tersebut dapat menolong para analis kebijakan untuk menata kelola masalah publik secara lebih komprehensif dan tidak berat sebelah.

Pertama-tama, perlu saya ulas kembali bahwa hakikat dari ilmu kebijakan publik merupakan ilmu yang berorientasi pada

masalah (*problem-oriented*). Hal tersebut menandakan bahwa studi-studi yang dilakukan di dalam lingkup keilmuan kebijakan publik dilakukan demi menjawab tuntutan suatu masalah bersama yang terjadi melalui pemberian alternatif-alternatif dan rekomendasi kebijakan untuk diterapkan. Dengan kata lain, ilmu kebijakan publik bukan melakukan studi terhadap suatu fenomena untuk kepentingan fenomena itu sendiri, melainkan meneruskan studi tersebut pada pertanyaan “lalu apa?” (*so what?*) (DeLeon dan Vogenbeck 2018). Itu sebabnya, pada mulanya konsep ilmu kebijakan (*policy sciences*) bertujuan untuk membentuk suatu ilmu sosial terapan (*applied social science*) yang dapat bertindak sebagai mediator antara akademisi, pengambil keputusan, serta masyarakat secara umum dengan menciptakan solusi-solusi yang objektif atas masalah-masalah bersama (Mardiyanta 2023). Perlu dicermati pula bahwa kata *sciences* dalam konsep *policy sciences* menggunakan bentuk jamak yang memperlihatkan bahwa, mengutip Harold Lasswell, ilmu kebijakan berfokus pada pengaplikasian ilmu-ilmu (*sciences*) dalam menghadapi isu-isu publik (1951). Sekali lagi, hal ini merupakan sebuah afirmasi bahwa ilmu kebijakan sejatinya berorientasi pada praktis penyelesaian masalah publik.

Di sisi lain, dalam perkembangannya ilmu kebijakan dibentuk oleh berbagai tradisi intelektual, memperlihatkan aspek lain dari keilmuan ini yang tidak semata-mata berorientasi pada praktis. Ilmu kebijakan mengukuhkan identitasnya sebagai ilmu pengetahuan, bukan sebagai ilmu sosial terapan (*applied social sciences*) melainkan sebagai ilmu kebijakan (*policy sciences*). Hal ini memerlukan penjabaran yang cukup atas asumsi ontologis, epistemologis, dan aksiologis yang terdapat di dalamnya. Secara ontologis, ilmu kebijakan dapat didefinisikan sebagai bentuk penyelidikan yang berusaha menghasilkan pengetahuan empiris yang berhubungan dengan masalah kebijakan (*policy problem*) (Reynolds 1975). Sehingga, objek kajian dari ilmu kebijakan adalah

kebijakan (*policy*) yang adalah suatu langkah atau serangkaian langkah yang dibuat dari suatu posisi dalam suatu praktik yang dapat diharapkan mempunyai setidaknya satu dari hasil berikut: (1) suatu modifikasi dari praktik tersebut atau praktik lainnya atau (2) kurangnya modifikasi terhadap praktik tersebut atau praktik lain padahal modifikasi dapat diharapkan terjadi jika perpindahan tidak dilakukan atau (3) terciptanya praktik lain (Reynolds 1975). Suatu kebijakan adalah kebijakan publik apabila praktik yang menjadi dasar pengambilan kebijakan tersebut atau praktik yang dihasilkannya merupakan praktik publik. Secara aksiologis, ilmu kebijakan telah dijabarkan sebelumnya bahwa memang terdapat orientasi praktis dari ilmu ini. Sementara itu, penjabaran secara epistemologis ilmu kebijakan akan dijabarkan pada bagian berikutnya pada pidato ini. Dengan demikian, ilmu kebijakan memanglah merupakan suatu ilmu pengetahuan yang fitrahnya tetap perlu dijaga.

Kedua hal ini, orientasi terhadap penyelesaian masalah secara praktis dan perkembangan keilmuan dalam keragaman tradisi intelektualnya, memperlihatkan kepada kita bahwa terdapat paradoks dalam ilmu kebijakan publik. Di satu sisi, ia dituntut untuk menjadi suluh bagi penyelesaian masalah publik, atau dengan kata lain menitikberatkan pada aspek praktisnya, di sisi lain, ia juga harus mempertahankan identitasnya sebagai suatu ilmu, sehingga pengabaian terhadap aspek-aspek teoritis, khususnya ontologis dan epistemologisnya. Lebih khusus lagi, basis epistemologis inilah yang memegang peranan penting dalam kaitannya dengan analisis kebijakan, sebab dari sanalah berbagai asumsi metodologis dan logika praktik analisis kebijakan digerakkan. Dengan kata lain, seorang ilmuwan kebijakan harus mampu memainkan relasi antara teori dan praktik secara abduktif, layaknya bandul yang bergerak dari ekstrem satu ke ekstrem lainnya dan begitu seterusnya.

Ungkapan yang mungkin berguna bagi wacana paradoksal ini adalah bahwa kebijakan publik sangat erat kaitannya dengan *pragmatisme* (Dunn 2019). Pragmatisme, bagi William Dunn, tidak berarti suatu sikap memandang rendah teori dan hanya mementingkan apa yang dapat diaplikasikan secara praktis. Bagi Dunn, itu adalah kesalahpahaman. Meski benar, ada pragmatisme vulgar yang mengkontraskan “aksi” dan “kontemplasi”, “praktik” dan “teori”, serta “kemanfaatan” dan “prinsip”. Pragmatisme, justru, berusaha untuk menghilangkan semua dikotomi tersebut. Dalam bahasa yang lebih sederhana, praktik adalah penyempurnaan dari teori, dan teori berasal dari dan menjadi basis bagi tindakan. Dalam hal ini, bagi saya, basis epistemologis dalam ilmu kebijakan merupakan titik pertemuan tersebut antara teori dan praktik, di mana dengan memahami hal tersebut, para ilmuwan dan analis kebijakan dapat menempatkan dirinya dalam konteks akademis maupun kebutuhan praktis dalam proses kebijakan publik.

Hadirin yang saya hormati,

Tentu ada banyak cara untuk mengklasifikasikan epistemologi suatu ilmu. Apalagi, realitas dalam keilmuan sosial, termasuk ilmu kebijakan publik, yang tidak memiliki pakem seringkali memberi ruang bagi suara-suara dalam komunitas epistemik berkumandang dan memberi argumentasi mereka masing-masing atas label epistemologi mana yang perlu ditonjolkan. Namun, dalam pengamatan saya, setidaknya akan sangat membantu para analis kebijakan bila basis epistemologis ilmu kebijakan diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu: positif-analitis, interpretif-politis, dan kritis-diskursif. Mengenai hal ini, secara panjang lebar sudah saya tuliskan di dalam publikasi terbaru saya *Memahami Kebijakan Publik*.

Dalam tradisi *positif-analitis*, kebijakan publik dimaknai sebagai suatu fakta sosial, di mana ia dilihat sebagai suatu desain rasional dan sistematis atas tindakan yang diambil berdasarkan berbagai alternatif cara (*means*) dan tujuan yang hendak dicapai (*end*). Untuk itu, bentuk kebijakan publik dalam perspektif ini dapat berupa tindakan sosial, program, atau proyek yang dikerjakan oleh negara untuk mengintervensi kehidupan publik. Itu sebabnya, dalam proses kebijakan, tahap formulasi dilihat sebagai sebuah pemilihan yang rasional atas berbagai alternatif kebijakan oleh para pemangku kepentingan. Kebijakan yang sudah disepakati bersama itu kemudian dilaksanakan dengan disiplin dalam suatu sistem kontrol yang jelas demi mencapai tujuan kebijakan yang hendak diraih, serta dilakukan penilaian atasnya dengan menggunakan berbagai pertimbangan rasional dan empiris, yakni melihat apakah pelaksanaan kebijakan tertentu telah mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan demikian, proses suatu kebijakan berjalan secara objektif atau bebas nilai (*value-free*).

Selanjutnya, dalam tradisi *interpretif-politis*, kebijakan publik dimaknai sebagai sebuah realitas yang dikonstruksi secara sosial oleh komunitas interpretatif (dalam hal ini bisa saja negara maupun kelompok kepentingan lainnya), serta merupakan tindakan-tindakan yang hendak diupayakan oleh setiap komunitas interpretatif ke dalam arena publik. Itu sebabnya, berkebalikan dengan tradisi positif-analitis, kebijakan publik sarat dengan nilai (*value-laden*), makna, preferensi, serta keinginan dan harapan yang diupayakan oleh negara maupun berbagai kelompok kepentingan demi kehidupan publik ideal yang diproyeksikan bersama. Aspek politis sangat bermain dalam prosesnya, di mana suatu kebijakan dapat terbentuk apabila terdapat kompromi dari pihak-pihak yang memiliki interpretasi yang saling bertentangan (pluralitas nilai). Dalam pelaksanaan kebijakan sebagai hasil kompromi tersebut,

Tabel 2. Basis Epistemologis Kebijakan Publik dan Implikasi Analisis Kebijakan

Basis Epi- stemologis	Definisi			Analisis Kebijakan	Analisis Kebijakan
Positif- Analitis	Kebijakan Publik: fakta sosial			Penjelasan sebab-akibat atas suatu kebijakan— Penyelesaian atas suatu masalah (<i>problem solving</i>)	Pemecah masalah (<i>problem solver</i>)
	<i>Formulasi Kebijakan:</i> pemilihan rasional atas berbagai alternatif	<i>Implementasi Kebijakan:</i> rencana pelaksanaan yang terkontrol	<i>Evaluasi Kebijakan:</i> penilaian secara rasional dan empiris		
Interpretif- Politis	Kebijakan Publik: konstruksi atas realitas sosial			Menafsirkan nilai yang terkandung dalam suatu kebijakan— Penafsiran atas suatu masalah (<i>problem interpretation</i>)	Praktisi deliberatif (<i>deliberative practitioner</i>)
	<i>Formulasi Kebijakan:</i> hasil politik atas kompromi interpretasi yang saling bertentangan	<i>Implementasi Kebijakan:</i> proses interpretasi multilateral dan multilevel dari pelaksanaan kebijakan	<i>Evaluasi Kebijakan:</i> interpretasi multilateral dan multilevel atas hasil dan konsekuensi kebijakan		
Kritis- Diskursif	Kebijakan Publik: totalitas diskursif yang dilegitimasi			Membongkar bias ideologis tertentu atas suatu kebijakan— Penyadaran atas suatu masalah (<i>problem awareness</i>)	Agen transformatif (<i>transformative agent</i>)
	<i>Formulasi Kebijakan:</i> pembentukan wacana terhadap isu kebijakan	<i>Implementasi Kebijakan:</i> strategi diskursif memper- tuhankan dominasi versi wacana tertentu atas masalah kebijakan yang dihadapi	<i>Evaluasi Kebijakan:</i> pem- bentukan wacana bagi efektivitas dan efisiensi kebijakan		

Sumber: dielaborasi dari Mardiyanta 2023

interpretasi multilateral maupun multilevel mengenai bagaimana suatu kebijakan dijalankan menjadi perhatian utamanya. Demikian pula dalam penilaiannya, hasil maupun konsekuensi kebijakan dinilai berdasarkan penafsiran multilateral dan multilevel tersebut.

Sementara itu, dalam tradisi *kritis-diskursif*, kebijakan publik merupakan sebuah bangunan wacana yang berada di bawah suatu konfigurasi pengetahuan atau kuasa tertentu dari suatu masyarakat dan dominasi tindakan yang dilegitimasi oleh konfigurasi wacana tersebut. Dengan kata lain, kebijakan publik merupakan suatu totalitas wacana yang dilegitimasi dan diberlakukan dalam arena publik masyarakat. Itu sebabnya, dalam prosesnya, formulasi kebijakan dilihat sebagai medan pertarungan wacana di mana di dalamnya terdapat permainan bahasa dalam bentuk persuasi dan argumentasi (strategi diskursif), sehingga wacana tersebut mendapat legitimasi. Wacana yang telah dilegitimasi tersebut perlu dilanggengkan dengan berbagai strategi diskursif atas masalah kebijakan yang dihadapi. Dalam menilai apakah tujuan kebijakan tersebut telah tercapai atau tidak, maka kembali konstruksi wacana menjadi alat yang penting bagi klaim efektivitas dan efisiensi suatu kebijakan.

Hadirin yang saya muliakan,

Setelah mengetahui ketiga peta mazhab kebijakan publik seperti yang telah saya jabarkan, sungguhkah ini dapat menolong praktik analisis kebijakan yang seringkali dihadapkan dengan kompleksitas masalah yang ada? Bukankah jauh lebih baik dilakukan penyeragaman metode analisis dan pelaporan untuk dapat memberikan rekomendasi kebijakan dengan cepat bagi pengambil keputusan? Saya cenderung tidak sepakat dengan asumsi ini. Masalah kebijakan yang kompleks justru memerlukan

heterogenitas atau alternatif-alternatif dalam cara mendekati masalah tersebut. Semakin banyak perbendaharaan metodologi yang dikuasai oleh seorang analis kebijakan, justru akan menolong para analis kebijakan tersebut untuk memposisikan dirinya dalam berhadapan dengan masalah tersebut. Sehingga, kemungkinan bagi para analis kebijakan untuk “mati kutu” saat menghadapi suatu masalah kebijakan menjadi sangat kecil. Faktanya, dalam kenyataan realitas analisis kebijakan, sadar atau tidak, para analis kebijakan memang tidak mungkin menggunakan satu pendekatan murni, meski pendekatan positif-analitis tetap yang acapkali mendominasi. Penguasaan keragaman basis epistemologis menjadi kunci, sebab dari sanalah kelincuhan metodologis seorang analis kebijakan dapat teraplikasikan. Tentu, tidaklah mungkin bagi saya untuk menjabarkan berbagai alat (*policy tools*) yang dapat digunakan berbasis pada ketiga basis epistemologis tersebut, namun hal tersebut sudah saya jabarkan dalam buku *Memahami Kebijakan Publik* yang saya tulis.

Dampak nyata yang lahir dari keragaman basis epistemologis tersebut adalah metode analisis kebijakan dan peran analis kebijakan yang beragam pula. Dalam tradisi *positif-analitis*, analisis kebijakan bertujuan untuk menyediakan penjelasan sebab-akibat atas suatu masalah publik melalui identifikasi dan verifikasi metode analisis tertentu. Hasil analisis sebab-akibat itulah kemudian yang diteruskan menjadi prediksi, kalkulasi *means-ends*, dan rekayasa teknis situasi kebijakan tertentu, sehingga terdapat kontrol atas situasi tersebut. Dengan demikian, analis kebijakan berfungsi sebagai pemecah masalah (*problem solver*) melalui proses teknokratik yang dikerjakan olehnya.

Berbeda dengan peran analis kebijakan sebagai pemecah masalah, dalam perspektif *interpretif-politis*, para analis kebijakan merupakan fasilitator bagi interpretasi suatu masalah publik atau yang disebut sebagai praktisi deliberatif (*deliberative practitioner*).

Analisis kebijakan tidak lagi bertujuan untuk menjelaskan sebab-akibat demi penyelesaian suatu masalah, tetapi untuk menafsirkan apa dan mengapa nilai tertentu diberi penekanan dalam suatu teks kebijakan dalam konteks kebijakan tersebut. Dalam proses penafsiran tersebut, diperlukan keterlibatan para partisipan kebijakan, yaitu pihak-pihak yang terkait erat dengan kebijakan tersebut, dalam suatu komunikasi yang bertujuan untuk mencapai kesepahaman bersama, memelihara konsensus, dan memungkinkan adanya solusi timbal-balik secara politis untuk isu kebijakan tertentu. Seperti yang diungkapkan oleh Dvora Yanow bahwa kebijakan publik merupakan “teks yang diinterpretasikan [dan] ... teks yang ‘dibaca’ oleh berbagai kelompok pemangku kepentingan” (2000). Sehingga, kepentingan bersama dalam pemahaman bersama (*mutual understanding*) dapat difasilitasi dan adalah tugas dari analisis kebijakan untuk memfasilitasi ruang pemahaman bersama yang demikian.

Sementara itu, perspektif *kritis-diskursif* mengambil posisi yang jauh lebih radikal (bila saya boleh menggunakan kata tersebut) dalam analisis kebijakan yang diselenggarakannya. Alih-alih mempertanyakan suatu kebijakan tertentu yang terdokumentasi dalam suatu teks kebijakan, ia hendak mengungkap sesuatu yang melampaui teks (*beyond the text*), yaitu metawacana (*metadiscourse*) di mana terdapat ideologi yang dapat mengarahkan terbentuknya dan terpeliharanya suatu kebijakan, serta bagaimana dan mengapa wacana tersebut dilegitimasi dalam suatu arena kebijakan. Tugas seorang analisis kebijakan, kalau demikian, adalah mengungkap dan menilai kemungkinan adanya bias dan distorsi sistemik yang dilegitimasi dalam suatu kebijakan tertentu dan berusaha untuk membebaskan manusia dan potensi sosial dari bias-bias dan distorsi-distorsi tersebut. Dengan kata lain, analisis kebijakan berperan untuk membongkar ideologi tertentu yang bersumber dari sistem kekuasaan tertentu yang mendasari suatu kebijakan publik

sehingga dapat tercipta penyadaran bersama (*public enlightenment*) (Fischer 2007).

Khusus untuk tradisi kritis-diskursif, saya perlu memberikan catatan tambahan. Analisis kebijakan dalam banyak praktiknya didominasi oleh perspektif positif-analitis dan interpretif-politis, sekalipun yang kedua acapkali diselenggarakan secara semu (tidak benar-benar menjadi fasilitator penafsiran), sebab perspektif kritis-diskursif dianggap tidak produktif. Alih-alih memberikan solusi atas masalah atau mufakat atas masalah, perspektif ini justru melanggengkan konflik atas suatu masalah kebijakan. Perspektif ini dapat dikatakan senafas dengan pemikiran Laclau dan Mouffe (2001) yang hendak menempatkan atau mengembalikan konflik atau antagonisme sebagai pilar utama demokrasi, yang disebutnya “demokrasi radikal”, sebagai alternatif terhadap demokrasi liberal yang dinilai sudah gagal akibat pendewaan rasionalitas sehingga mengabaikan aspek politis (bdk. Mouffe 2005; Mouffe 2013). Dalam pandangan agonistik Mouffe, kebijakan publik dipahami sebagai institusionalisasi konflik kepentingan atau nilai-nilai yang menuntut keputusan politik sekaligus sebagai arena dan instrumen transformasi konflik. Transformasi ini perlu diletakkan dalam dua perspektif sekaligus, yakni perspektif kritis terkait emansipasi dan perspektif praktis terkait upaya untuk mewujudkannya. Dalam perspektif ini, kebijakan publik merupakan perangkat dan sekaligus produk institusionalisasi konflik, di mana transformasi kebijakan publik dimulai dengan penggunaan cara berpikir kritis-reflektif, yang mana merupakan lanjutan dari deliberatif, dilanjutkan dengan cara berpikir kritis-emansipatif. Untuk itu, adalah keliru bila menganggap bahwa perspektif kritis-diskursif kontraproduktif di dalam proses kebijakan publik. Justru, melalui perspektif ini, analisis kebijakan berpotensi mengumandangkan upaya perubahan kebijakan (*policy change*) secara lebih radikal.

Keragaman basis epistemologis, berikut implikasinya bagi praktik analisis kebijakan dan peran analis kebijakan, perlu dipromosikan pada ranah praktis analisis kebijakan, tak terkecuali di Indonesia. Indonesia, dengan berbagai pergumulan kebijakannya yang masih dibalut dengan berbagai kepentingan politiknya perlu memikirkan ulang positivisme yang selama ini menghegemoni proses kebijakan publik. Para analis kebijakan pun perlu memainkan peran layaknya aktor, berdasarkan tujuan yang hendak dicapainya dalam menata kelola masalah, entah *problem solving*, *problem interpretation*, maupun *problem awareness*. Sejalan pula dengan natur ilmu kebijakan dengan pragmatismenya, kepelbagaian basis epistemologis dan implikasi metodologis dan praktisnya ini sungguh dapat menjadi jembatan antara yang abstrak dengan yang konkret, antara teori dan praksis, antara ilmu kebijakan (*policy sciences*) dan pekerjaan kebijakan (*policy works*).

Hadirin yang berbahagia,

Analisis Kebijakan yang Andal

Berdasarkan Permen PAN & RB No. 45 Tahun 2013 dan Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara (Perkalan) No. 31 Tahun 2014, seorang analis kebijakan dituntut untuk memiliki dua kompetensi, yaitu kemampuan analisis dan kemampuan politis. Kemampuan analisis terdiri dari lima kompetensi inti, yaitu (1) pengetahuan tentang substansi kebijakan publik; (2) metode riset; (3) teknik dan analisis kebijakan; (4) kemampuan menulis dan publikasi; dan (5) pengetahuan tentang bidang pekerjaan, dengan satu kompetensi spesialis: penyusunan saran kebijakan. Dengan kata lain, kemampuan ini berguna bagi menghasilkan informasi kebijakan yang berkualitas. Sementara itu, kemampuan politis juga terdiri dari lima kompetensi inti, yaitu (1) konteks politik

(dinamika politik dan budaya birokrasi); (2) regulasi dan legislasi; (3) komunikasi; (4) membangun jejaring; dan (5) presentasi, dengan dua kompetensi ini: konsultasi publik dan *partnership*. Dengan kata lain, kompetensi politis merupakan kemampuan untuk mengadvokasi informasi kebijakan. Kembali kepada pembagian *konten* dan *proses* kebijakan, analisis kebijakan memainkan peran pada kedua hal tersebut, di mana kemampuan analisis dan politis berguna bagi penciptaan *konten* kebijakan yang menjawab permasalahan kebijakan dalam suatu *proses* kebijakan yang sehat. Lalu, apa yang harus dikerjakan sekarang dalam menyongsong kebijakan publik Indonesia yang jauh lebih berkualitas? Semua kembali kepada adanya reformasi pada institusi negara yang di dalamnya terdapat para analis kebijakan (pertimbangan makro), perguruan tinggi dan lembaga pembina sebagai pelatih utama para analis kebijakan (pertimbangan meso), serta bergantung pada individu analis kebijakan itu sendiri (pertimbangan mikro).

Pada tataran *makro*, yakni suprastruktur politik berikut birokrasinya, relasi antara penguasa-penasihat (*ruler-advisor*) perlu mendapat perhatian. Relasi politisi-ahli, pembuat kebijakan dan analis kebijakan, membutuhkan ekosistem baru. Pertama-tama, tentu para pembuat kebijakan perlu memberikan tempat bagi suara para analis kebijakan, mau mendengar pertimbangan-pertimbangan yang diberikan olehnya. Di satu pihak, para analis kebijakan pun perlu memahami berbagai pertimbangan politis yang mengiringi pembuatan kebijakan serta memahami bagaimana cara terbaik untuk menyampaikan pertimbangan-pertimbangan yang ada. Diperlukan kolaborasi, komunikasi yang terbuka, rasa saling menghormati di antara keduanya (*mutual respect*), serta kesatuan visi untuk memutuskan kebijakan yang tepat guna serta mendapat legitimasi yang kokoh dari publik. Selain itu, kinerja sesama analis kebijakan pun harus lebih cair dan kolaboratif, serta menghargai lintas ilmu dan lintas disiplin. Konsekuensinya, penting pula

adanya perubahan dalam pemberian apresiasi terhadap kinerja para pejabat fungsional analis kebijakan, di mana tuntutan kerja kolaboratif harus diikuti pula dengan pola apresiasi yang kolaboratif juga.

Pada tataran *meso*, yakni perguruan tinggi maupun lembaga yang melakukan pembinaan bagi para analis kebijakan, apresiasi terhadap keragaman basis epistemologis perlu diwujudkan dalam berbagai bentuk pengajaran dan pelatihannya. Saya teringat dengan Prof. Soetandyo Wignjosebroto, guru saya dan guru kita semua yang telah mendahului kita, pernah mengatakan bahwa semua pendekatan, perspektif, dan tradisi intelektual perlu diajarkan di ruang-ruang kelas. Dengan melakukan hal tersebut, universitas dan lembaga pembina dapat menjadi wadah bagi analis kebijakan untuk menumbuhkembangkan kepekaan mereka dalam meramu masalah-masalah kebijakan yang ada dalam rangka memberi pertimbangan bagi pengambil keputusan. Sudah berkali-kali saya sebutkan sepanjang pidato ini bahwa tradisi positivisme dalam praktik analisis kebijakan sudah menjadi hegemoni, dan tak dapat dimungkiri hal tersebut merupakan akibat dari perguruan tinggi yang juga didominasi oleh positivisme.

Konsep kebijakan berbasis bukti (*evidence-based policy*), misalnya, sudah menjadi perbendaharaan kata, bahkan jargon, di dalam proses kebijakan publik. Bukti (*evidence*), yang merupakan hasil dari penelusuran empiris, didewakan menjadi satu-satunya hal yang perlu seorang analis kebijakan temukan dan kerjakan. Analisis kebijakan yang demikian, suka atau tidak, sesungguhnya telah berperan dalam dehumanisasi proses kebijakan publik, sebab objektivitas telah menggantikan subjektivitas normatif manusia dalam pertimbangan utama pengambilan keputusan. Padahal, bila ditelusuri lebih dalam, konsep “bukti” dalam kebijakan publik pun sangat bersifat politis (Cairney 2016), di mana satu kelompok dapat memaknai “bukti” secara berbeda dengan kelompok lain di

dalam suatu komunitas kebijakan. Artinya, konsep “bukti” pun sangat berkait erat dengan nilai yang dianut oleh suatu individu atau kelompok (*value-laden*). Sehingga, berdasarkan pada “bukti” saja itu tidak cukup.

Diperlukan nilai (*value*) yang memberikan pertimbangan-pertimbangan moral, diperlukan pula wacana (*discourse*) yang menjadi instrumen bagi penyampaian aspirasi kebijakan. Dengan mempertimbangkan nilai dan wacana, proses kebijakan publik menjadi inklusif, secara khusus bagi mereka yang selama ini termarginalkan dalam suatu arena kebijakan. Analisis kebijakan berperan menjadi fasilitator sekaligus penggerak (*enabler*) bagi mereka yang menjadi korban konten maupun proses kebijakan publik dengan mengingatkan yang berkuasa. Tentu, pilihan kosakata, narasi, dan retorika yang dibangun dalam pengadvokasian kebijakan perlu disesuaikan dengan bahasa birokrasi sehingga dapat dipahami dan diterima oleh mereka. Tidak dapat dipungkiri, kesenjangan sosial, politik, dan ekonomi masih merupakan problem yang nyata di Indonesia, membuat konflik antarkelas tak terhindarkan. Pelayanan publik seringkali juga bias terhadap mereka yang berkuasa secara sosial, politik, dan ekonomi. Analisis kebijakan interpretif-politis dan kritis-diskursif dapat menjadi jalan emansipasif bagi transformasi sosial. Untuk itu, mengutip Cairney (2021), analisis kebijakan perlu memainkan peran yang berorientasi pada klien demi tujuan pragmatis sekaligus peran kritisnya menantang ketidaksetaraan dan marginalisasi.

Dalam praktiknya, perguruan tinggi bersama-sama dengan lembaga pembinaan analisis kebijakan perlu merumuskan bagaimana bentuk pendokumentasian (*policy brief, policy paper*) hasil analisis yang terbaik, sehingga hasil dokumentasi tersebut tidak menyalahi batas-batas tradisi intelektual tertentu dan dapat diterima oleh para pengambil keputusan. Dalam bayangan saya, tentulah *policy brief* tradisi positif-analitis akan berbeda dengan interpretif-

politis dan kritis-diskursif. Namun, pada prinsipnya, ia harus tetap dipahami oleh *audiens* yang membacanya, khususnya para pembuat kebijakan. Untuk hal ini, para ilmuwan kebijakan harus mempersiapkan daya terbaiknya untuk melakukan eksperimen dalam penelitian kebijakan mengenai bagaimana teknik dokumentasi tertulis terbaik bagi analisis kebijakan pada tradisi interpretif-politis maupun kritis-diskursif. Harapan saya, gagasan ini dapat disambut baik oleh para ilmuwan dan periset kebijakan yang mendengar hal ini.

Selain itu, dalam proses pelatihan para talenta-talenta analisis kebijakan ini, perguruan tinggi maupun lembaga pembina tidak dapat dilakukan dengan metode konvensional seperti mencurahkan air, tetapi fasilitator pendidikan dan pelatihan harus dapat menjadi pemantik, sehingga para analisis kebijakan dapat mengembangkan diri melalui pembelajaran mandiri (*self-learning*). Harapannya, model ini dapat membentuk budaya belajar para analisis kebijakan dengan daya kreativitas dan rasa ingin tahu yang tinggi.

Hal inilah yang kemudian membawa kita pada tataran *mikro*, yaitu individu analisis kebijakan yang berada di dalam tubuh birokrasi. Secara individual, para analisis kebijakan perlu pandai-pandai memainkan perannya di dalam suatu “drama kebijakan publik”. Analisis kebijakan tak ayal merupakan seorang aktor yang mampu menempatkan dirinya di dalam relasi kuasa dengan para pengambil keputusan. Peran yang dimainkan, entah menjadi *problem solver*, *deliberative practitioner*, atau *transformative agent*, dapat dilakukan secara lincah sesuai dengan kebutuhan dalam proses kebijakan saat itu. Dengan demikian, melalui kemampuan analisis yang dikerjakan (berdasar pada basis epistemologi) sesungguhnya analisis kebijakan pun sedang menjalankan peran politisnya di mana ia dapat memerankan dalam menjawab kebutuhan pada konteks saat itu. Untuk itu, penguasaan terhadap ketiga peran tersebut menjadi sangat vital. Dengan kata lain,

diperlukan adanya peningkatan kapasitas individual, di mana para analis kebijakan menguasai substansi atau konten kebijakan, di lain pihak ia pun memiliki pendirian epistemologis sehingga dapat memberikan kontribusi analisis yang unik sesuai dengan pendirian yang ia dasarkan.

Hadirin yang berbahagia,

Pada bagian akhir pidato pengukuhan ini, saya mengajak kembali para hadirin untuk merefleksikan kondisi dunia kita di tengah tantangan zaman digital dan pascakebenaran. Keduanya saling berkelindan, dan suka atau tidak suka, memengaruhi proses kebijakan publik, tak terkecuali di negara kita. Penetrasi teknologi informasi dan komunikasi, khususnya media sosial di Indonesia merupakan salah satu yang tertinggi di dunia, di lain pihak kemampuan analitis untuk memilah dan menilai kebenaran suatu informasi oleh masyarakat masih menjadi tantangan tersendiri. Di lain pihak, media sosial telah bersumbangsih dalam menyuarakan suara-suara marjinal yang mungkin selama ini luput didengar oleh pembuat kebijakan. Media sosial dapat menjadi rekan bagi analis kebijakan, khususnya untuk melihat bagaimana persepsi terhadap suatu kebijakan publik dibentuk oleh masyarakat digital. Analisis kebijakan perlu mengembangkan potensinya pula, dibekali dengan berbagai alat untuk melakukan “blusukan digital”.

Meski peran sebagai penasihat kebijakan sudah ada bahkan sejak zaman kerajaan-kerajaan Nusantara dengan relasi yang personal dan idiosinkratik terhadap penguasa, peran penasihat kebijakan (baca: analis kebijakan) baru dikukuhkan secara resmi menjadi pegawai negara pada tahun 2013. Itu berarti, ini merupakan jabatan yang relatif masih muda. Tanpa menegasikan kontribusi para pendahulu dalam merumuskan peran analis kebijakan di dalam tubuh birokrasi, saya mengajak seluruh

ilmuwan kebijakan untuk terus bekerja keras dalam mematangkan posisi para analis kebijakan agar siap menghadapi tantangan zaman yang terus berubah. Sehingga, kebijakan publik yang dihasilkan sungguh-sungguh tepat sasaran (konten yang tepat), serta menancap dengan kuat pada sasaran tersebut (proses yang diakui). Hadirin sekalian, demikian gagasan yang dapat saya sampaikan dalam pidato pengukuhan ini. Terima kasih.

Sebagai penutup, saya mengucapkan syukur Alhamdulillah kepada Allah Subhanahu Wata'ala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan karunia-Nya pada kami sekeluarga, sehingga atas kehendak dan takdir-Nya saya berada di posisi ini. Jabatan Guru Besar ini dapat saya raih atas dukungan, bantuan, dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan yang baik ini, dengan segala kerendahan hati, saya haturkan rasa hormat dan terima kasih saya kepada seluruh pihak yang telah mendukung ketercapaian ini. Namun saya mohon maaf jika ada yang tidak dapat saya sebutkan nama satu-persatu mengingat keterbatasan waktu.

Kepada yang terhormat Rektor universitas Airlangga, Prof. Dr. Muhammad Nasih, SE., M.T., Ak., CMA; para Wakil Rektor Prof. Dr. Bambang Sektiari Lukiswanto, drh., DEA; Prof. Dr. Muhammad Madyan, SE., M.Si., M.Fin; Prof. Dr. Ni Nyoman Puspitaningsih, Dra., M.Si.; Prof. Muhammad Miftahussuruur, dr., M.Kes., Sp.PD-KGEH, Ph.D. Terima kasih sebesar-besarnya atas bimbingan, semangat, bantuan serta dukungan, serta persetujuan pengusulan saya sebagai Guru Besar. Semoga Allah SWT ridho selalu melimpahkan keberkahanNya.

Dengan kerendahan hati, saya menghaturkan terima kasih kepada Ketua Senat Akademik Universitas Airlangga, Prof. Djoko Santosa, dr., Ph.D., Sp.PD, KGEH, FINASIM dan Sekretaris Senat Akademik, Prof. Dr. Mustain Mashud, Drs., M.Si., beserta seluruh anggota yang telah banyak membantu, mengusulkan dan

menyetujui pengangkatan saya sebagai Guru Besar. Terima kasih juga saya sampaikan kepada Sekretaris Universitas Airlangga, Dr. Koko Srimulyo, Drs., M.Si. yang telah memberikan dukungan, semangat, motivasi dan persetujuan pengangkatan saya sebagai Guru Besar.

Ucapan terima kasih saya haturkan kepada Tim PAK Universitas dan Tim PAK Fakultas atas jerih lelah yang sudah menilai usulan guru besar saya. Saya mengucapkan terima kasih kepada Direktur Sumberdaya Manusia Universitas Airlangga, Dr. Endang Dewi Masithah, Ir., MP., beserta jajarannya yang telah meluangkan waktu, tenaga, pikiran untuk memberikan dukungan, perhatian dan bantuan dalam proses pengusulan guru besar saya. Demikian pula rasa terima kasih saya ucapkan kepada Prof. Dr. I Made Narsa, SE., M.Si., Ak., CA., serta Prof. Rachmah Ida, Dra, MA., PhD. yang telah menilai PAK guru besar saya.

Yang saya hormati Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prof. Dr. Bagong Suyanto, Drs., M.Si., yang telah mendukung, memberi semangat, menilai, menyetujui. Demikian pula saya mengucapkan terima kasih kepada para Wakil dekan, Prof. Dr. Jusuf Irianto, Drs., M.Com, Sulikah Asmorowati, S.Sos., M.Dev.St., Ph.D., dan Irfan Wahyudi, S.Sos., M.Comm., Ph.D. yang telah mendukung usulan guru besar saya.

Kepada Ketua BPF, Prof. Rachmah Ida, Dra., MA. PhD beserta Sekretaris dan seluruh anggota yang telah menyetujui usulan guru besar saya disampaikan terima kasih.

Pada kesempatan yang baik ini, saya ingin menyampaikan terima kasih kepada dua orang yang sangat penting artinya dalam perjalanan karir akademik saya. Beliau berdua bukan hanya panutan akademik bagi saya, namun juga telah berjasa besar memberi modal awal yang sangat berarti dalam perjalanan karir saya sebagai dosen di Universitas Airlangga ini. Beliau berdua adalah Almarhum Prof. Soetandyo Wignyosubroto, MPA

– dekan pertama dan salah satu pendiri FISIP Unair; dan Prof. Sofian Effendi, Drs., MPIA., PhD. guru panutan saya, mantan rector Universitas Gadjahmada. Berkat kebaikan beliau berdua saya mendapat kesempatan berkarir sebagai dosen di Universitas Airlangga.

Kepada para senior dan guru besar di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, para kolega Ketua Departemen, KPS, Sekdep, dan lain-lain terima kasih atas kehangatan dan kolegaialitasnya yang kondusif.

Kepada para kolega di Departemen Administrasi Publik yang sudah menjadi bagian dari keluarga besar saya disampaikan terima kasih atas kehangatan dan kekompakannya.

Terima kasih kepada Prof. Dr. Irfan Islamy, MPA. (almarhum), Prof. Dr. Soesilo Zauhar, MS., Prof. Drs. Andy Fefta Wijaya, MDA., PhD dari Universitas Brawijaya yang telah membimbing saya saat menempuh program S3.

Terima kasih pula kepada Prof. Dr. Azhar Kasim, MPA dan Prof. Dr. Martani Huseini yang telah membimbing saya saat menempuh program Magister di Universitas Indonesia. Awalnya proposal tesis dibimbing L. Schmidt, PhD – dosen tamu dari Leiden University, namun menjelang ujian proposal Presiden Suharto membubarkan IGGI, sehingga Mr Schmidt harus pulang kembali ke negaranya. Pembimbing tesis dilanjutkan Prof Dr Azhar Kasim, MPA dan Prof. Dr. Martani Huseini hingga lulus.

Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Prof. Dr. Warsito Utomo (Universitas Gadjahmada) pembimbing skripsi saya, beserta seluruh dosen di Jurusan Ilmu Administrasi Negara FISIPOL UGM saat menyelesaikan studi tingkat sarjana S1.

Terima kasih kepada para guru saya di SMA N 1 Sleman, SMP N 2 Sleman, SD Muhammadiyah Domban 3 Sleman.

Terima kasih banyak kepada Bapak Hans Antlov, PhD., Robert van derhoff, Philip Schwem, PhD., Judith Estroom, George

Swenson, PhD. Widjono Ngoedijo, PhD (alm)., Luthfi Ashari, Prima Setiyawan, Sunardi, Dina Limanto beserta banyak kawan yang lain atas kesempatannya menjadi konsultan Program yang didanai oleh Worldbank, USAID, ADB, AUSAID dan lembaga donor lain sehingga saya berkesempatan belajar dan melakukan pengamatan langsung sambil terlibat dalam praktik Tatakelola pemerintahan serta kebijakan publik di Indonesia..

Keluarga besan Bapak Nur Suhud dan Ibu Ambarwati maturnuwun sanget atas kekompakan dan kebersamaannya selama ini dan seterusnya, juga yang tidak bisa saya lupakan sudah menjadi pengambil alih peran orang tua saat keluarga saya dilanda krisis akibat Covid-19 dua tahun yang lalu.

Yang istimewa posisinya dalam hidup saya adalah ke dua orang tua saya. Bapak Haji Abdul Wahab dan Ibu Hj. Boniah Abdul Wahab atas doa yang tiada putus-putusnya. Saya yakin berkat doa Ibu dan Bapak saya, Allah swt ridho, saya dapat berdiri di posisi saat ini. Namun karena kondisi sudah sepuh, usia 94 dan 93 tahun beliau berdua tidak bisa rawuh bersama kita di ruang Garuda Mukti yang terhormat ini.

Demikian pula kepada keluarga mertua Bapak H. Muhammad Hoesin (almarhum) dan Ibu Hj Aisyah (almarhumah) beserta seluruh keluarga besar Banyuwangi, maturnuwun sanget atas semua doa dan dukungannya kepada saya sekeluarga.

Kepada adik-adik saya, Om Riyanto, Om Slamet Rahayu, Om Juniharta terima kasih atas semua kebaikannya, pengorbanannya, atas kekompakannya untuk saling memahami memelihara situasi kondusif dalam keluarga besar kita, bersama berikhtiar agar ke dua orang tua kita bisa tetap sehat, istiqomah dalam ibadah, ridho mendoakan seluruh anak, menantu, cucu dan buyut-buyutnya.

Terakhir, ada seseorang yang hari ini sudah tidak ada lagi, namun jasanya sangat besar dalam perjalanan karir saya. Dia adalah almarhumah istri saya. Kepada almarhumah istri saya

Dyah Nur Iriani, SE saya sangat banyak berhutang budi. Karena almarhumahlah yang sebenarnya menjadi penyemangat yang tidak pernah surut agar saya mau terus berusaha untuk mencapai guru besar di usia yang tidak muda lagi ini. Almarhumah selalu mengingatkan: “Ayo Pak semangat, supaya nanti cucu-cucu kita bangga punya eyang kakung Profesor.”

Untuk anak-anak saya Rifqi Andi Frebrianto, Irfan Andi Wicaksono, menantu saya Ritma Palupi terima kasih sudah selalu peduli kepada Bapaknya, selalu mengerti Bapaknya, selalu menyemangati, mendukung, bahkan membantu mencukupi keperluan Bapaknya, sehingga Bapak tidak pernah merasa sendiri dalam melanjutkan kehidupan keluarga kita.

Akhirnya, terima kasih atas kehadiran dan kesabarannya mendengarkan pidato pengukuhan pada pagi ini. Mohon tambahan doa hadirin agar saya dikaruniai kesehatan dan kekuatan untuk mengabdikan sedikit ilmu pada Universitas Airlangga yang kita cintai dan umumnya untuk bangsa dan tanah-air Indonesia. Semoga Allah SWT meridloi niat baik kita bersama. Aamiin

Wabillahitaufiq wal hidayah

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

REFERENSI

- Cairney, Paul. 2016. *The Politics of Evidence-Based Policy Making*. London: Palgrave Macmillan.
- Cairney, Paul. 2021. *The Politics of Policy Analysis*. Cham: Palgrave Macmillan.
- CNBC Indonesia. "Jokowi Mau Hapus 2 Level Eselon Kementerian, Bisakah?" 20 Oktober 2019. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20191020180540-4-108523/jokowi-mau-hapus-2-level-eselon-kementerian-bisakah>.
- DeLeon, Peter dan Danielle M. Vogenbeck. 2018. "The Policy Sciences at the Crossroads." Dalam *Handbook of Public Policy Analysis: Theory, Politics, and Methods*. New York: Routledge.
- Dunn, William. 2018. *Public Policy Analysis: An Integrated Approach*. Edisi Keenam. New York: Routledge.
- Dunn, William. 2019. *Pragmatism and the Origins of Policy Sciences: Rediscovering Lasswell and the Chicago School*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Dzulfaroh, Ahmad Naufal. "Pangkas Eselon III dan IV, Jokowi Diingatkan Tak Tergesa-gesa Diganti dengan AI." *Kompas.com*, 21 November 2019. <https://www.kompas.com/tren/read/2019/11/29/191800265/pangkas-eselon-iii-dan-iv-jokowi-diingatkan-tak-tergesa-gesa-ganti-dengan?page=all>.
- Fischer, Frank. 2007. "Policy Analysis in Critical Perspective: The Epistemic of Discursive Practices." *Critical Policy Analysis* 1 (1): 97–109. <https://doi.org/10.1080/19460171.2007.9518510>.
- Fischer, Frank. 2021. *Truth and Post-Truth in Public Policy: Interpreting the Arguments*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Gerbaudo, Paolo. 2012. *Tweets and the Streets: Social Media and Contemporary Activism*. London: PlutoPress.
- Ginsberg, Benjarmin dan Collin Paschall. 2022. *Speaking Truth to Power: Expertise, Politics and Governance*. Glos & Massachusetts: Edward Elgar.
- Head, Brian W. 2022. *Wicked Problems in Public Policy: Understanding and Responding to Complex Challenges*. Cham: Palgrave Macmillan.

- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. "Kebijakan Publik Tepat, Negara Maju." 18 Desember 2014. <https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/kebijakan-publik-tepat-negara-maju>.
- Kementerian Sekretariat Negara. "Transformasi Ekosistem dan Kapasitas Analisis Kebijakan yang Kolaboratif, Lincah, dan Adaptif." Youtube, 11:14. 1 April 2021. <https://www.youtube.com/watch?v=w-8sNRSZGU>.
- Kristina, Agit, Aldhino Niki Mancera, Indri Dwi Apriliyanti, dan Media Wahyudi Askar. 2021. *Panduan Optimalisasi Peran Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara. <https://www.ksi-indonesia.org/assets/uploads/original/2021/07/ksi-1626260157.pdf>.
- Laclau, Ernesto, dan Chantal Mouffe. 2001. *Hegemony and Socialist Strategy: Towards a Radical Democratic Politics*. London: Verso.
- Lasswell, Harold D. 1951. "The Policy Orientation." Dalam *The Policy Sciences: Recent Developments in Scope and Method*, disunting oleh D. Lerner dan Harold D. Lasswell, 3–15. Stanford: Stanford University Press.
- Lembaga Administrasi Negara. 2021. *Rancangan Laporan Kinerja Tahun 2022 Pusat Pembinaan Analisis Kebijakan*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara. <https://drive.google.com/file/d/1hbpSFy4gp9kpAPFDBsK1zRNfHxpBcYjw/view>.
- Mardiyanta, Antun. 2023. *Memahami Kebijakan Publik: Perspektif Teori, Perkembangan dan Diskursus*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Mouffe, Chantal. 2005. *On the Political*. Abingdon: Routledge.
- Mouffe, Chantal. 2013. *Hegemony, Radical Democracy, and the Political*. Abingdon: Routledge.
- Purwanto, Erwan Agus, Agus Pramusinto, Wahyudi Kumorotomo, Nanang Pamuji Mugasejati, Ambar Widaningrum, dan Indri Dwi Apriliyanti. 2015. *Mengembangkan Profesi Analisis Kebijakan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Rambukkana, Nathan. 2015. *Hashtag Publics: The Power and Politics of Discursive Networks*. New York: Peter Lang.

- Reynolds, James F. 1975. "Policy Science: A Conceptual and Methodological Analysis." *Policy Sciences* 6: 1–27. <http://www.jstor.org/stable/4531585>.
- Safutra, Ilham. "430 Ribu Pejabat Bakal Terimbas Efisiensi Eselon." *Jawa Pos*, 26 Oktober 2019. <https://www.jawapos.com/nasional/01242087/430-ribu-pejabat-bakal-terimbas-efisiensi-eselon>.
- Suwana, Fiona. 2020. "What motivates digital activism? The case of the Save KPK movement in Indonesia." *Information, Communication & Society* 23 (9): 1295–1310. <https://doi.org/10.1080/1369118X.2018.1563205>.
- Wildavsky, Aaron. 2017. *Speaking Truth to Power: Art and Craft of Policy Analysis*. New York: Routledge.
- Worldwide Governance Indicator. "Data Bank | Worldwide Governance Indicator." Diakses 24 Agustus 2023. <https://databank.worldbank.org/source/worldwide-governance-indicators>.
- Yanow, Dvora. 2020. *Conducting Interpretive Policy Analysis*. Thousand Oaks: Sage Publications.

RIWAYAT HIDUP

A. Data Pribadi:

Nama Lengkap	: Antun Mardiyanta
Tempat/Tanggal Lahir	: Sleman, 31 Oktober 1961
NIP	: 196110311988101001
Agama	: Islam
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Status Perkawinan	: Kawin (Duda cerai meninggal dunia)
Nama Istri	: Diah Nur Iriani (Almarhumah)
Nama Anak	: Rifqi Andi Febrianto Irfan Andi Wicaksono
Pekerjaan	: Dosen
Golongan/Pangkat	: IV/a/Pembina
Jabatan Akademik	: Guru Besar
Perguruan Tinggi	: Universitas Airlangga
Alamat	: Kampus B; Jln Darmawangsa Dalam Surabaya Telpon: 031 – 5034015
Alamat Rumah	: Taman Surya Agung B-9, Taman, Sidoarjo Telpon: 031 – 7882205
Alamat e-mail	: antun.mardiyanta@fisip.unair.ac.id

B. Riwayat Pendidikan

Pendidikan Dasar, Menengah dan Tinggi (S1-S3)

Tahun 1972 : SD Muhammadiyah Domban III Sleman DIY

Tahun 1975 : SMPN II Sleman DIY

Tahun 1979 : SMAN I Sleman DIY

Tahun 1981 : PAAP Fakultas Ekonomi
Universitas Gadjahmada

Tahun 1984 : Sarjana Muda (BA) Administrasi Negara FISIPOL
Universitas Gadjahmada

Tahun 1986 : S1 Administrasi Negara FISIPOL
Universitas Gadjahmada

Tahun 1994 : S2 Administrasi Negara Program Pascasarjana
Universitas Indonesia

Tahun 2012 : S3 Administrasi Publik PDIA-FIA
Universitas Brawijaya

C. Pendidikan Tambahan: Pelatihan/Lokakarya/Simposium

Tahun 1989 : Short Course Metode Penelitian Sosial di PAU-IS-
Universitas Indonesia

Tahun 1989 : Program Kuliah Berkredit Teori Organisasi di
PAU-IS-Universitas Indonesia

Tahun 1990 : Kursus Metode Analisis Data dengan SPSS di PAU-
IS-Universitas Indonesia

Tahun 1990 : Short Course Metodologi Penelitian Kualitatif di
PAU-IS_ Universitas Indonesia

Tahun 1994 : Training Analisis kebijakan Sosial di Universitas
Gadjahmada

Tahun 2001 : Legislative Drafting Training Departemen
Kehakiman dan HAM RI

Tahun 2002 : Legiaslative Drafting ToT San Fransisco University
School of Law

- Tahun 2005 : Technology of Participation Training LGSP USAID
- Tahun 2005 : Training on Material of Performance Budgeting – LGSP USAID
- Tahun 2006 : Training on Participatory Planning – LGSP USAID
- Tahun 2006 : Training on Local Public Financial Management – LGSP USAID
- Tahun 2006 : Training on Training Design – LGSP USAID
- Tahun 2008 : Training on Budget Oversight – LGSP USAID

D. Publikasi Ilmiah melalui Jurnal

- Tahun 1989 : Mardiyanta, Antun, Desain Organisasi sebagai Konteks Kegiatan Politik, Jurnal Masyarakat, Kebudayaan dan Politik
- Tahun 1994 : Mardiyanta, Antun, Konfigurasi Perkembangan Teori Organisasi, Jurnal Masyarakat, Kebudayaan dan Politik Tahun VIII, No 3-4, Agustus, hal 1-16
- Tahun 1994 : Mardiyanta, Antun, Pengaruh Budaya organisasi terhadap Implementasi Kebijakan Otonomi Perguruan Tinggi Negeri, Majalah Aspirasi FISIP Unej, Nomor 3/IV/Des/1994, hal. 56-71;
- Tahun 1997 : Mardiyanta, Antun, Studi Evaluasi: Program Community Based Distribution (CBD) BKKBN di Provinsi Jawa Timur, jurnal Masyarakat, Kebudayaan dan Politik tahun X, No 1 Januari 1997, hal. 110-129;
- Tahun 1999 : Mardiyanta, Antun, Perubahan Kebijakan Pemanfaatan Lahan di Kodya Surabaya: Studi Kasus Kawasan Surabaya Barat, Jurnal Studi

Indonesia Universitas Terbuka, Vol 9 No 2 Agustus 1999, hal. 54-67;

Tahun 2001 : Mardiyanta, Antun, Kajian Evaluatif Pengembangan Wilayah Provinsi Jawa Timur, Jurnal Masyarakat, Kebudayaan dan Politik, Tahun XIV, No 3 Juli 2001, hal. 25-46;

Tahun 2001 : Mardiyanta, Antun, Menuju Organisasi Berkeunggulan Kompetitif Yang Berkesinambungan: Suatu Tinjauan Restrukturisasi dari aspek Manajemen Sumberdaya Manusia, JEB;S, Vol 1 No 2 Tahun 2001, hal 22-28;

Tahun 2011 : Mardiyanta, Antun, Doktrin Manajemen Sektor Publik Berorientasi Hasil dan Kemungkinan Aplikasinya di Indonesia, Jurnal Jejaring Administrasi Publik, Tahun III No 2 Juli-Desember 2011, hal. 119-124;

Tahun 2011 : Mardiyanta, Antun, Kebijakan Publik Deliberatif: Relevansi dan Tantangan Implementasinya, Jurnal Masyarakat Kebudayaan dan Politik, 24 (3) hal 261-271;

Tahun 2013 : Mardiyanta, Antun, Restore Public Trust through Deliberative Public Policy Formulation, jurnal Bisnis dan Birokrasi: Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi, Vol 20 No 1 Tahun 2013, hal. 9-17;

Tahun 2013 : Mardiyanta, Antun, State of The Art Konsep Partisipasi dalam Ilmu Administrasi Publik, Jurnal Masyarakat, Kebudayaan dan Politik, Vol 26 No 4 Tahun 2013, hal. 227-242;

Tahun 2013 : Mardiyanta, Antun, Proses Perumusan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Perspektif Kebijakan Deliberatif. Studi Kasus di

Kabupaten Probolinggo, Conference Proceedings Kebijakan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional bekerjasama dengan UB, Unpad, Unair< UNS, Undip, Jakarta 2013, hal. 117-132:

- Tahun 2015 : Mardiyanta, Antun, Erna Setijaningrum, Eko Supeno, Philipus Keban, Analisis Prospektif Kebijakan Penggabungan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya, Studi Penggabungan Kelurahan Prapen dan Panjang Jiwo, Jurnal Jejaring Administrasi Publik Vol 7 No 1 Tahun 2015, hal. 717-727
- Tahun 2017 : Rindri, Andewi Gati, Antun Mardiyanta, Erna Setijaningrum, Enhancing The Easy of Doing Business in Surabaya through One Stop Shop (OSS) Licensing Service, dalam: Towards Open Government, Finding The Whole Government Approach, Proceeding International Conference, Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Airlangga 2017, p. 186-192;
- Tahun 2017 : Allen Pranata Putra, Antun Mardiyanta, Faris Widyatmoko, Dynamics of Actors and Institutions in the Formulatiopn of Transportation Policy Based on Information Technology in East Java, Proceedings of the International Post-Graduate Conference on Media and Communication, 200-206;
- Tahun 2017 : Kristiani, Djoko Mursinto, Antun Mardiyanta, Model Development of Civil Society Participation in Post Implementation of Rural Development Act No 6, 2014 in Banaran, Grogol, District of

Sukoharjo, Journal of Economics and Sustainable Development, Vol 8 No 8 , p. 176-185.

- Tahun 2018 : Miftakhul Huda, Ary, Antun Mardiyanta, Erna Setijaningrum, Can Public-Private Partnership Policy Reduce Poverty and grow Sustainable Economies in Indonesia?)Case Study Approach), Proceeding of International Conference Series on Life Cycle Assessment: Life Cycle Assessment as A Metric to Achieve Sustainable Development Goals (ICSOLCA 2018), Jakarta, Indonesia, p. 1-6;
- Tahun 2019 : Mardiyanta, Antun, Innovation for Better Public Services, Lessons from The Regency of Bondowoso and the Regency of Barru, International Conference on Public Policy and Social Sciences, UiTM Mara, 104-109;
- Tahun 2020 : Hartono, Alina Sari, Sulikah Asmorowati, Antun Mardiyanta, Safer City, Public Services Improvement Through Emergency Management System, proceeding of the 2nd AICoBPA, Atlantis Press, p. 69-75;
- Tahun 2020 : R Rahardian, R Wijayanti, Antun Mardiyanta, Using The Advocacy Coalition Framework to Reject The Environmental Permit for Hazardous and Toxic Waste Processing: Resources and Strategy Used by Community of Lakardowo Village, Jurnal Studi Pemerintahan Vol 11 No 1 Thn 2020, hal. 24-41;
- Tahun 2020 : Mardatillah, Jusuf Irianto, Antun Mardiyanta, Phenomena Behavior Fraud in Government, Journal of Applied Management, Vol 18 No 2, 2020, p. 300-306;

- Tahun 2021 : Sawitri, Dewi Khrisna, Mustain Mashud, Antun Mardiyanta, How Do Bankers Work Deviantly in The Credit Sectors, Journal of Applied Management, Vol. 19 No 3, 2020, p. 678-687;
- Tahun 2021 : Asterik, Okky Fiorentina, Antun Mardiyanta, Erna Setijaningrum, Overcoming Slums Statement: Lessons Learned from Implementation of Uninhabitable House Social rehabilitation Program in Surabaya, DIA – Jurnal Administrasi Publik, Vol 19 No 1, 2021, hal 1-28;
- Tahun 2022 : Bahar, Adam Amin, Kacung Marijan, Antun Mardiyanta, Politics of Sickness: Political Struggles Over The Meaning of Sick in Dealing with The Covid-19 Pandemic In Indonesia, Jurnal Masyarakat, Kebudayaan dan Politik, Vol 35 No 2, 2022, hal 170-179;
- Tahun 2022 : Nur Abadi, Ahmad, Fendi Suhariadi, Antun Mardiyanta, Teguh Triwiyanto, Maulana Amirul Adha, Digital Principal Instructional Leadership in New Normal Era, International Journal of Evaluation and Research in Education (IJERE), Vol 11 No 3 September 2022, p. 1090-1098;
- Tahun 2023 : Mardiyanta, Antun, Calvin Nathan Wijaya, Policy Capacity During Covid-19 In Asia: A Systematic Literature Review; Journal of Public Affairs, Vol 23 Issue 1, Feb 2023, p. 1-18;
- Tahun 2023 : Iffant Gallant Muhammady, Antun Mardiyanta, A Suryono, HL Rizkika, Who Owns Big Data? Examine the Policies of Rural Government in Indonesia, Proceeding International Conference: Promoting Adaptive System to the Current

Turbulence within Crisis Environments, Airlangga University Press, 298-306;

Tahun 2023 : Suji, Falih Suaedi, Antun Mardiyanta, Innovative Leadership – Discressive in Improvement Sustainable Village Participation, Journal of Humanities and Social Studies, Vol 7 No 1 march 2023, p. 304-312;

Tahun 2023 : Mardiyanta, Antun, Doni Ernawan, Gray Area Between Policy Success and Failure: Assessing the Degree of Success of Law Number 7 of 2016 in The Salt Industrialization Program in West Nusa tenggara Province, Jurnal Masyarakat, Kebudayaan dan Politik, Vol 36 No 1, 2023, hal. 156-177.

E. Penulisan Buku

Tahun 2001 : Mardiyanta, Antun, Restrukturisasi Kelembagaan Pemerintahan Lokal, dalam M Asfar, Implementasi Otonomi Daerah: Kasus Jatim, NTT, Kaltim, diterbitkan atas kerjasama Center for Public Policy Studies (CPPS), Civil Society Strengthening Support Program (CSSP-USAID) dan Pusat Studi Demokrasi dan HAM, hal 53-94;

Tahun 2001 : Mardiyanta, Antun, Keungan Daerah dan Sumberdaya Alam, dalam M. Asfar, Implementasi otonomi Daerah: Kasus Jatim, NTT, Kaltim, diterbitkan atas kerjasama Center for Public policy Studies (CPPS), Civil Society Strengthening Support Program (CSSP - USAID) dan Pusat Studi Demokrasi dan HAM, hal. 137-168;

- Tahun 2001 : Materi Pelatihan, Penyiapan dan Kesiapan Aparatur Pemda dalam Implementasi otonomi Daerah, kerjasama Center for Public Policy Studies (CPPS) dengan Civil Society Strengthening Support Program (CSSP-USAID) dan Pusat Studi Demokrasi dan HAM
- Tahun 2021 : Mardiyanta, Antun, Kelembagaan Pemda dan TNI Pasca Pengembalian Fungsi Teritorial, dalam M. Asfar (ed), Pengembalian Fungsi Teritorial dari TNI ke Pemerintahan Daerah, Airlangga University Press, 2021, hal. 197-220;
- Tahun 2022 : Noor, Muhammad, Fali Suaedi, Antun Mardiyanta, Collaborative Governance, Suatu Tinjauan Teoretis dan Praktik, Bildung, Yogyakarta;
- Tahun 2023 : L Mardiyanta, Antun, Memahami Kebijakan Publik, Perspektif Teori, Perkembangan dan Diskursus, Graha Ilmu, Yogyakarta.

F. Pembicara Seminar, Kuliah Tamu (5 Tahun Terakhir)

- Tahun 2018 : Mardiyanta, Antun, Public Administration, research Methods and Tradition of Inquiry, presented for Seminar on Research in Public Administration, FSPPP-UiTM Seremban Campus, Malaysia
- Tahun 2018 : Mardiyanta, Antun, Understanding Public Policy: An Applied Problem Solving, Guest Lecture Series, FSPPP UiTM Cawangan Negeri Sembilan, Kampus Seremban, Malaysia
- Tahun 2019 : Mardiyanta, Antun, Public Policy Studies, Research Methods and Tradition of inquiry, Guest Lecture, Post Graduate FSPPP UiTM Seremban, Malaysia

- Tahun 2020 : Mardiyanta, Antun, Calvin Nathan Wijaya, Policy capacity During Covid-19 in Asia: A systematic Literatur Review, presented in IAPA Annual (virtual) International Conference, 11 November 2020;**
- Tahun 2021 : Mardiyanta, Antun, Penerapan Agile Governance dalam Menghadapi tantangan di Era Revolusi 4.0, guest lecture di Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Krisna Dwipayana Jakarta;**
- Tahun 2022 : Mardiyanta, Antun, Agent of innovation Strategy as The Regional Innovation Driver, disampaikan dalam peran sebagai narasumber dan fasilitator FGD dalam Lokakarya Optimalisasi Inovasi Daerah yang diselenggarakan oleh Pemkab Sidoarjo bekerjasama dengan USAID-ERAT, 15 September 2022;**
- Tahun 2022 : Mardiyanta, Antun, Peran Pemerintah Desa dalam pencegahan dan Penurunan Stunting, disampaikan dalam peran sebagai Narasumber dan fasilitator FGD ERAT USAID bekerjasama dengan Pemkab Lamongan**
- Tahun 2023 : Mardiyanta, Antun, Riset Interpretive untuk Kebijakan yang Inklusif, Dipresentasikan dalam seminar bulanan Pusat Riset Kebijakan Publik (PRKP) Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Jakarta, 17 Mei 2023.**

G. PENELITIAN 5 TAHUN TERAKHIR

- Tahun 2019 : Pemetaan Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Kabupaten Mahakam Hulu Provinsi Kalimantan Timur**
- Tahun 2021 : Interaksi Antar Aktor Dalam Perspektif Collaborative Governance (Studi tentang Kebijakan Penanganan Permukiman Kumuh Pada Bantaran Sungai di Kota Banjarmasin)**
- Tahun 2022 : When Discretion is Distress: Administrative Burden and the Adaptivity of Street-level Bureaucrats in Public Service Delivery (A Case Study of Frontline Health Workers in Indonesia's COVID-19 Emergency Hospital Kemayoran Athletes Village)**
- Tahun 2023 : Penyusunan Analisis Kebutuhan Diklat dan Analisis Kesenjangan Kinerja pada Pemerintah Kabupaten Bojonegoro**